

USULAN RS COVID KHUSUS PEJABAT

**Nasdem DKI: Jangan Korbarkan Rakyat**

JAKARTA (IM) - Ketua Fraksi Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andriano tidak sependapat dengan usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus covid-19 untuk pejabat. Wibi mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tegas dan jelas disebut setiap warga negara berhak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. "Jangan khianati UUD. Pasal 28 H Ayat 1 dan 2 Setiap orang (warga negara Indonesia) berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," kata

anyanya Kamis (8/7). Pejabat menurutnya justru seharusnya rela berkorban demi rakyatnya. Bukan justru malah mengorbankan rakyat. "Jangan mentang-mentang pejabat terus maunya dapat 'karpet merah'," kata Anggota Komisi A DPRD DKI ini.

Politisi muda ini berharap seluruh pejabat negara, kader-kader partai politik, bisa bergotong-royong membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mendukung kerja-kerja pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran virus covid-19. "Gotong-royong agar ringan. Membantu sesama adalah perbuatan mulia," pungkaskan Wibi. ● yan

**Anies Pastikan Gaji ASN tak Dipotong untuk Penanganan Covid-19 Tahun Ini**

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta tidak mengalami pemotongan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 tahun ini.

"Oh enggak (termasuk yang digeser untuk penanganan Covid-19), tahun ini sejauh ini Alhamdulillah aman," kata Anies dalam rekaman suara, Kamis (7/8). Dia mengatakan, kondisi ini berbeda dari tahun lalu yang memaksa PNS di Jakarta dipotong 50 persen untuk program bantuan sosial.

Anies menjelaskan, tahun lalu Pemprov DKI mengambil keputusan sulit memotong gaji bulanan PNS hingga 50 persen untuk memberikan Bansos 1,6 juta keluarga terdampak pandemi. "Tidak biasanya terjadi di mana ASN gaji bulannya dipotong tapi tahun lalu kita harus ambil keputusan itu," ucap Anies.

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan refocusing atau pergeseran anggaran dari satu program ke program penanganan Covid-19.

Dia menyebut pergeseran anggaran akan diprioritaskan untuk keselamatan warga Jakarta. Jajaran Pemprov DKI, ucap Anies, terus bekerja menyesuaikan pergeseran anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. "Bila dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Jakarta, maka kita akan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhannya," ujar dia.

Namun Anies enggan menyebut anggaran dari program apa saja yang akan digeser untuk penanganan Covid-19 ini.

Selain menggeser anggaran, Anies mengatakan, Pemprov DKI juga men-

gandakan banyak bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan penanganan Covid-19. Termasuk untuk penyaluran bantuan sosial di masa pandemi yang dinilai cukup penting sebagai jaring pengaman sosial.

"Sebenarnya (bantuan) lebih banyak dari pemerintah pusat juga untuk bantuan sosial. Bansos yang akan berjalan juga karena itu tidak kalah penting," ucap Anies.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mulai merencanakan refocusing APBD 2021 untuk penanganan Covid-19. "Mereka (Pemprov DKI) sudah merencanakan sejak hari Jumat (2/7) yang lalu, mereka sedang menghitung secara teknis pos-pos mana yang tidak bisa dilaksanakan secara waktu," ujar Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Selasa (6/7) kemarin.

Refocusing tahun ini, kata Mujiyono, akan menjadi lebih sulit karena rata-rata anggaran digunakan untuk program prioritas Pemprov DKI.

Berbeda dengan tahun lalu banyak anggaran non-prioritas bisa dicoret dengan mudah dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Kalau dulu kan yang nggak prioritas banyak seperti kegiatan sosialisasi, gampang kita refocusing. Kalau sekarang hampir semuanya prioritas," ucap dia.

Politikus Demokrat ini mengatakan, refocusing juga sulit dilakukan karena Belanja Tidak Terduga (BIT) sudah dianggarkan sampai dengan Rp 5 triliun saat awal penyusunan APBD 2021. Sehingga sulit untuk ditambah lagi karena anggaran BIT dinilai sudah cukup banyak. ● yan

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA

**VAKSINASI COVID-19 GRATIS DI STASIUN MRT JAKARTA**

Warga mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di Stasiun MRT ASEAN, Jakarta, Kamis (8/7). MRT Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan vaksinasi gratis di stasiun MRT dengan tahap pertama berlangsung pada 8-10 Juli 2021, total keseluruhan target vaksinasi sebanyak 4.000 dosis yang dibagi ke dalam kuota harian selama periode tiga bulan ke depan.

## Akibat PPKM Darurat, 35 Ribu Warteg se-Jabodetabek Terancam Gulung Tikar

Dari 35 ribu pengusaha Warteg yang terancam gulung tikar tersebut merupakan dari kalangan menengah ke bawah yang kurang cukup permodalannya. Asosiasi pengusaha Warteg tak mampu berharap banyak pada Pemerintah untuk membantu karena pemerintah juga sedang memikul banyak beban.

JAKARTA (IM) - Dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebanyak 35 ribu atau 75 persen pengusaha Warung Tegal (Warteg) se-Jabodetabek terancam gulung tikar.

Ketua Koordinator Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni mengatakan, sebelum diberlakukan PPKM Darurat saja, sebanyak 20 ribu pengusaha Warteg memilih menutup usahanya karena anjloknya omset akibat

turunnya daya beli masyarakat dampak dari pandemi Covid-19.

Setelah PPKM Darurat diberlakukan di Jawa dan Bali, jumlah pengusaha Warteg yang memilih menutup usahanya bertambah menjadi 35 ribu.

"Karena pandemi Covid-19 saja sudah 50 persen tutup, PPKM Darurat ini bisa meningkat ke 75 persen jika terus berlanjut, sekitar 35 ribu Warteg," kata Mukroni saat dihubungi, Kamis (8/7).

Mukroni menjelaskan, rata-rata pengusaha Warteg yang memilih menutup usahanya selama pandemi Covid-19, karena tak mampu membayar uang sewa tempat.

Dari 35 ribu pengusaha Warteg yang terancam gulung

tikar tersebut merupakan dari kalangan menengah ke bawah yang kurang cukup permodalannya.

"Tutup tidak mampu bayar sewa kontrakan. Bisa tutup sementara bisa seterusnya tergantung kemampuan individu. Ya yang modalnya pas-pasan, ya melihat resiko jualannya terus merugi," ujarnya.

Meski begitu Mukroni tak mampu berharap banyak pada Pemerintah untuk dapat membantu menangani masalah yang diderita pengusaha Warteg. Pasalnya saat pandemi virus Korona ini, pemerintah sedang memikul banyak beban.

Mukroni pun hanya bisa berharap pada pengusaha Warteg untuk terus bersabar menjalani ujian krisis kes-

ehatan ini.

"Pemerintah lagi banyak beban, kembali ke kata mutiara, barang siapa bersabar maka beruntung," pungkasnya.

Seperti diketahui, PPKM Darurat resmi berlaku sejak tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 mendatang di Jawa dan Bali.

Selama PPKM Darurat, yang diizinkan beroperasi hanya sektor esensial dan kritikal dengan sejumlah pembatasan dan protokol kesehatan ketat.

Untuk operasional tempat usaha makanan dan minuman seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan hanya diperbolehkan menerima pesanan take away (dibungkus bawa pulang). Tidak diperbolehkan makan di tempat atau dine in. ● yan

## Pemprov DKI Percepat Penerbitan STRP Selama Masa PPKM Darurat Covid-19

JAKARTA (IM) - Dengan ditetapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengendalian mobilitas penduduk untuk keluar masuk wilayah melalui Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP).

STRP itu berlaku bagi pekerja di sektor esensial, pekerja sektor kritikal, dan perorangan dengan kebutuhan mendesak. Kebijakan STRP tersebut tertuang dalam Seruan Gubernur

DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Mobilitas Penduduk Dalam PPKM Darurat Covid-19.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Agusandri menerangkan tujuan dari kebijakan STRP ini adalah untuk mengendalikan mobilitas penduduk di wilayah DKI Jakarta agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-

serta memudahkan petugas gabungan di lapangan dalam mengidentifikasi warga yang diperbolehkan melakukan mobilitas atau pergerakan selama masa PPKM Darurat Covid-19.

"Pemerintah telah menyerukan kepada masyarakat untuk kegiatan di rumah, tidak dianjurkan melakukan aktifitas luar rumah maupun pergerakan lintas wilayah termasuk keluar masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta," ujar ujar Benni dalam keterangannya secara virtual Kamis, (8/7).

"Kecuali untuk kegiatan

pada sektor esensial, kritikal dan perorangan dengan kebutuhan mendesak sesuai peraturan perundangan. Sebelum mengajukan STRP disarankan agar Pemohon mempelajari terlebih dahulu prosedur dan mekanisme STRP serta mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan" imbuhnya.

Benni menjelaskan Pemprov DKI Jakarta telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan sertifikasi elektronik (Certification Authority) terhadap output izin dan nonizin

guna memastikan pertukaran informasi yang efisien dan aman. STRP dilengkapi dengan QR Code dan Tanda Tangan Elektronik yang dapat digunakan sebagai otentikasi perizinan STRP bagi petugas, anggota TNI/Polri dan Pemerintah Daerah di lapangan.

"Petugas Gabungan di Lapangan dapat melakukan otentifikasi perizinan STRP secara mudah melalui Scan QR Code yang tertera dalam STRP dengan perangkat telekomunikasi elektronik/ Handphone Petugas," ujar Benni. ● pp

## Ombudsman DKI Minta Kemenkes Turunkan Tarif Swab Antigen

JAKARTA (IM) - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menurunkan tarif pemeriksaan swab antigen di masyarakat. Saat ini, tugas para tenaga kesehatan terpecah antara penanganan pasien Covid-19 dan non Covid-19.

"Banyak masyarakat di wilayah Jakarta Raya yang tidak ter tracing setelah melakukan kontak erat dan juga tidak melakukan swab mandiri karena tingginya harga Swab Antigen di tengah ekonomi yang terus merosot," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7).

Dia meminta agar tarif swab antigen dapat diakses oleh masyarakat menengah ke bawah. Idealnya,

swab antigen dapat dilakukan di fasilitas kesehatan (faskes) pratama BPJS Kesehatan setelah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19.

"Dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa harus menunggu jadwal di Puskesmas atau rumah sakit rujukan. Cukup rekomendasi Puskesmas sebagai syarat administrasi dan masyarakat sudah bisa tes swab antigen di semua faskes pratama BPJS," ujarnya.

Sedangkan untuk masyarakat yang ingin melakukan deteksi dini melalui fasilitas negara, pemerintah dapat menurunkan harga alat deteksi tersebut.

"Jika hal ini juga dilakukan secara bussines as usual, dikha-

watirkan penurunan angka suspect tidak dengan mudah terjadi karena potensi penyebaran Covid-19 menjadi lebih besar akibat keterlambatan proses deteksi," jelas Teguh.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyatakan proses vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota masih terus berjalan.

Kata dia, saat ini vaksinasi dosis pertama saat ini sudah mencapai 5.072.833 orang atau 57,5 persen.

"Dengan jumlah yang divaksin dosis 1 sebanyak 163.157 orang. Sedangkan total dosis 2 kini mencapai 1.943.092 orang atau 22 persen," kata Dwi dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7). ● yan

## Langgar PPKM Darurat, Pemprov DKI Sudah Segel 202 Perusahaan

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan pihaknya telah menutup sementara atau menyegel 202 perusahaan selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Hal ini berdasarkan hasil sidak terhadap 276 perusahaan atau tempat usaha sejak 5 Juli hingga 8 Juli 2021.

"Dari 276 perusahaan yang disidak mulai 5 Juli 2021 hingga saat ini, ada 202 perusahaan ditutup sementara, sementara 74 perusahaan tidak melanggar," ujar Andri

di Jakarta, Kamis (8/7).

Dari jumlah tersebut, kata Andri, sebanyak 187 perusahaan yang ditutup karena ditemukan karyawannya positif Covid-19 dan 15 perusahaan lainnya ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Ke-187 perusahaan yang ditutup di Jakarta Pusat sebanyak 79 perusahaan, Jakarta Barat 27 perusahaan, Jakarta Utara (19), Jakarta Timur (6), dan Jakarta Selatan (56).

"Yang ditutup karena langgar protokol kesehatan ada 4 perusahaan di Jakarta Pusat yang terdiri

dari 2 perusahaan non esensial dan 2 perusahaan esensial, 2 perusahaan di Jakarta Barat masing-masing satu perusahaan non esensial dan esensial, lalu 9 perusahaan di Jakarta Selatan yang terdiri dari 4 perusahaan non esensial dan 5 perusahaan esensial," jelas Andri.

Andri mengatakan jumlah perusahaan di Jakarta sebanyak 85.335 dengan rincian 9.257 perusahaan esensial, 13.026 perusahaan kritikal, dan 63.052 perusahaan non esensial. Sementara jumlah pekerja di Jakarta sebanyak 2,5 juta pekerja dan yang ber-KTP DKI Jakarta 1,1 juta pekerja. ● yan

**SUDARMAN HARISAPUTRA, S.T., M.Si.**  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Administrasi Jakarta Timur

*Terus maju, terus berkembang dan sukses.  
Semoga semua hal baik senantiasa menyertai International Media.*